

# Petunjuk Teknis Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

**Eksekusi Pidana Mati Tindak Pidana Narkotika** *Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika - Rajawali Pers*
**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MALAPY 2022** *MIC 2021 ICLSSEE 2021 ICLSSEE 2022 Knowledge Management in Organizations Drugs Law and Legal Practice in Southeast Asia*
**TINDAK PIDANA KHUSUS** Mari bersatu memberantas bahaya penyalahgunaan narkoba (naza). *Kontroversi hukuman mati*
**Hukum Tindak Pidana Khusus** *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika*
**ICLHR 2021 ASEAN International Law Narkoba dari Tapal Batas Negara**
**Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Transnational Organized Crime and International Security**
**Bunga Rampai Isu-Isu Krusial tentang Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)**
**Empowering Science and Mathematics for Global Competitiveness**
*Hukum Pidana Khusus Dalam Teori Dan Penegakamya*
**Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia**
**Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP**
**Edisi Revisi**
**Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan**
**Pemandu di Belantara Narkoba**
**Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas & Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana**
*Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Jagalah Dirimu dan Keluargamu dari "Api" Narkoba*
**Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana**
**Perlindungan hukum terhadap whistleblower dan justice collaborator dalam upaya penanggulangan organized crime**
**Kapita Selekta Pidana Khusus**
**Prinsip Dan Praktik Bantuan Hukum Di Indonesia Edisi Pertama**
**Penegakan Hukum PenyalahgunaanNarkoba di Indonesia**
**Masalah narkotika, psikotropika, dan obat2 berbahaya**
**KOMIK : Kumpulan Obrolan Mahasiswa Intra Komahi**
**Parlementaria**
**Delik-delik yang Berada di Luar KUHP**
*Hukum Kejahatan Bisnis Teori & Praktik di Era Globalisasi*
**REKONSTRUKSI PARADIGMA DAN SISTEM HUKUM INDONESIA DI ERA PANDEMI COVID-19**

Thank you completely much for downloading **Petunjuk Teknis Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika** .Most likely you have knowledge that, people have look numerous times for their favorite books subsequently this Petunjuk Teknis Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika, but end up in harmful downloads.

Rather than enjoying a good PDF subsequent to a cup of coffee in the afternoon, on the other hand they juggled behind some harmful virus inside their computer. **Petunjuk Teknis Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika** is handy in our digital library an online right of entry to it is set as public as a result you can download it instantly. Our digital library saves in multipart countries, allowing you to get the most less latency epoch to download any of our books as soon as this one. Merely said, the Petunjuk Teknis Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika is universally compatible past any devices to read.

## Referensi

**Pemandu di Belantara Narkoba** Aug 31 2020 WHO menyebutkan setidaknya terdapat 450 ribu orang yang meninggal per hari akibat penyalahgunaan napza di seluruh dunia dan 30-50 jiwa berasal dari Indonesia. Sementara itu, Provinsi Bali termasuk daerah di Indonesia yang rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Salah satu unsur yang berada di garis depan dalam proses rehabilitasi pecandu (penyalah-guna) narkoba adalah konselor adiksi. Berbagai metode digunakan dalam konseling ini, dan komunikasi terapeutik adalah salah satunya. Tak hanya bagi petugas rehabilitasi, buku hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi siapa saja yang ingin melihat lebih jauh bahwa komunikasi yang baik sesungguhnya bisa menjadi obat yang manjur untuk mengatasi problema psikis manusia.

**KOMIK : Kumpulan Obrolan Mahasiswa Intra Komahi** Oct 21 2019 Buku ini merupakan kumpulan kajian yang telah diselenggarakan oleh BSO KOMAHI FH UNAIR 2018. Di dalamnya memuat banyak topik yang diperbincangkan, mulai dari isu-isu hukum yang bersifat ius constitum, seperti fenomena persekusi, fenomena hukum besifat ius constituendum, seperti urgensi pengadilan pertahanan, selaiun itu terdapat pembahasan dalam tataran konsep hukum, seperti kesalahan penafsiran terhadap konflik hukum maupun kasus-kasus hukum imager, seperti pembunuhan terhadap orang yang dianggap meninggal, dsb.

*Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika - Rajawali Pers*
Sep 24 2022 Penyalahgunaan narkotika di negeri ini sudah sangat merisaukan. Atas dasar kerisauan terhadap situasi tersebut, tak heran bila pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika membentuk suatu lembaga yang khusus menjalankan tugas untuk menyusun kebijakan dan pelaksanaan di bidang P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika), serta melaksanakan P4GN dengan membentuk satgas- satgas yang bersifat operasional. Lembaga tersebut kini dikenal dengan nama Badan Narkotika Nasional (BNN)—yang awalnya sebelum diubah bernama Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN). Buku ini berbicara mengenai budaya hukum penegak hukum khususnya BNN dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Terdiri dari beberapa bab, pembahasan naskah ini dibuka dengan pembahasan ihwal BNN di Indonesia dan konstruksi sosial BNN. Kemudian berlanjut kepada pembahasan tentang konstruksi, penegak hukum BNN, budaya hukum, dan hukum progresif. Berikutnya disajikan pembahasan terkait implementasi budaya hukum penegak hukum BNN dalam menangani tindak pidana narkotika. Di bagian akhir buku ini, disajikan pembahasan mengenai konstruksi budaya hukum penegak hukum BNN dalam perspektif hukum progresif. Buku ini dapat dibaca oleh berbagai kalangan. Mulai dari mahasiswa- mahasiswi Fakultas Hukum, pengajar Fakultas Hukum, praktisi hukum, para penegak hukum, hingga mereka yang memiliki perhatian terhadap masalah penyalahgunaan tindakan pidana narkotika.

*Hukum Kejahatan Bisnis Teori & Praktik di Era Globalisasi*
Jul 18 2019 Perkembangan dan problem utama—kejahatan bisnis (business crime) yang dilakukan oleh perorangan dan/atau suatu korporasi yang legal, baik bisnis domestik maupun bisnis internasional—dalam perekonomian global, telah banyak memengaruhi dinamika perekonomian dalam negeri Indonesia, termasuk dalam industri perbankan dan moneter. Referensi penting ini merupakan handbook tentang Hukum Kejahatan Bisnis yang membahas perkembangan historis, sosiologis, serta komparatif dan yuridis masalah berkaitan dengan aktivitas bisnis yang bertujuan memperoleh keuntungan finansial melalui cara-cara yang melanggar hukum—kejahatan bisnis (business crime)—di Indonesia. Buku persembahan penerbit prenadaMedia

*ASEAN International Law*
Jul 10 2021 This book consists of updated and refreshed papers written by international law scholars and practitioners from the ASEAN region and published by the Journal of East Asia and International Law, comprehensively covering almost all contemporary international legal issues related to ASEAN. Legal analysis of the ASEAN integration as one community with one vision in this book provides readers with a better understanding of the current social climate and future developments of ASEAN. Each section within the book covers a highly topical issue on ASEAN cooperation and dispute resolution from an international law perspective. ASEAN is one of the biggest economic communities in the world and the ASEAN+3 covers nearly half of global GDP. Given the regions global impact, this book is of interest to Asia watchers, academics and policymakers alike.

*ICLHR 2021*
Aug 11 2021 This book contains the proceedings of the First International Conference on law and human rights (ICLHR 2021). Where held on 14rd-15th April 2021 by virtually meeting in GMT+7 (Asia/Jakarta). This conference was held by Universitas Kristen Indonesia with the theme "ASEAN diversities and its principles toward ASEAN (Legal) Integration in Pandemic Era." The papers from this conference were collected in a proceedings book entitled: Proceedings of the First International Conference on law and human rights (ICLHR 2021). The presentation of such a multi-discipline conference will provide a lot of inspiring inputs and new knowledge on current trends in the fields of human rights, criminal law, civil law, politics, public policy, health law, education law, economic law, international law, and international private law. According to the argument, this conference will act as a valuable reference for numerous relevant research efforts in the future, especially in ASEAN. The committee recognizes that the smoothness and success of this conference cannot be separated from the cooperation of numerous stakeholders. As such, we like to offer our profound gratitude to the distinguished keynote speaker, invited speaker, paper presenters, and participants for their enthusiastic support of joining the First International Conference on law and human rights. We are convinced that the contents of the study from various papers are not only encouraged productive discussion among presenters and participants but also inspire further research in the respected field. We are greatly grateful for your willingness to join and share your knowledge and expertise at our conference. Your input was essential in ensuring the success of our conference. Finally, we hope that this conference will serve as a forum for learning in building togetherness, especially for academic networks and the realization of a meaningful academic atmosphere for the development of digital literacy in various fields of life. Thus, we hope to see you all at the second ICLHR.

**Hukum Tindak Pidana Khusus** Oct 13 2021 Hukum Tindak Pidana Khusus menjabarkan setiap tindak pidana khusus yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia. Terbagi menjadi sembilan bab pembahasan utama.

**Parlementaria** Sep 19 2019

**Delik-delik yang Berada di Luar KUHP** Aug 19 2019 Perkembangan masyarakat mempunyai pengaruh pada perkembangan hukum yang berlaku, termasuk di Indonesia. Dalam hukum pidana yang umumnya diatur dalam KUHP, karena adanya perkembangan dalam masyarakat yang semakin maju/berkembang maka peraturan-peraturan yang ada tidak memadai lagi, maka dibuatlah Undang-undang baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Apa saja delik-delik hukum yang ada di luar KUHP?? Baca selengkapnya di buku ini
Buku Delik-delik yang berada di Luar KUHP ini diterbitkan oleh penerbit deepublish dan tersedia juga versi cetaknya. --Penerbit Deepublish, Deepublish, Hukum, KUHP, Dr. Hj. Tina Asmarawati, S.H., M.H.--

*Knowledge Management in Organizations*
Mar 18 2022 This book contains the refereed proceedings of the 13th International Conference on Knowledge Management in Organizations, KMO 2018, held in Žilina, Slovakia, in August 2018. The theme of the conference was "Emerging Research for Knowledge Management in Organizations." The 59 papers accepted for KMO 2018 were selected from 141 submissions and are organized in topical sections on: Knowledge management models and analysis; knowledge sharing; knowledge transfer and learning; knowledge and service innovation; knowledge creation; knowledge and organization; information systems and information science; knowledge and technology management; data mining and intelligent science; business and customer relationship management; big data and IoT; and new trends in IT.

*Drugs Law and Legal Practice in Southeast Asia*
Feb 17 2022 Drugs Law and Legal Practice in Southeast Asia investigates criminal law and practice relevant to drugs regulation in three Southeast Asian jurisdictions: Indonesia, Singapore and Vietnam. These jurisdictions represent a spectrum of approaches to drug regulation in Southeast Asia, highlighting differences in practice between civil and common law countries, and between liberal and authoritarian states. This book offers the first major English language empirical investigation and comparative analysis of regulation, jurisprudence, court procedure, and practices relating to drugs law enforcement in these three states.

**REKONSTRUKSI PARADIGMA DAN SISTEM HUKUM INDONESIA DI ERA PANDEMI COVID-19**
Jun 16 2019 Buku ini merupakan kumpulan ide-ide konstruktif dengan beragam topik, namun terikat dalam satu judul, yaitu Rekonstruksi Paradigma dan Sistem Hukum Indonesia di Era Pandemi Covid-19. Buku ini terdiri atas 11 (sebelas) bab dan ditulis oleh 26 pakar. Bab I, membahas tentang Peluang dan Tantangan Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, ditulis oleh Fitri Wahyuni dan Riana Kesuma Ayu. Bab 2, membahas tentang Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga Berorientasi pada Restorative of Justice, ditulis oleh Susi Delmiati. Bab 3, membahas tentang Upaya Preventif di Wilayah Polres Batubara dalam Penanganan Peredaran Narkotika (Studi di Polres Batubara Provinsi Sumatera Utara), ditulis oleh Muhammad Salim Fauzi Lubis dan Rani Januarta Manurung. Bab 4, membahas tentang Hukum Bisnis dan Etika Bisnis, ditulis oleh Erny Rachmawati. Bab 5, membahas tentang Regulasi Hukum Jaminan Produk Halal di Indonesia, ditulis oleh Maisyarah Rahmi. Bab 6, membahas tentang Suspend Kekuatan Hukum Mengikat Kontrak Pertambangan Implikasi Pandemic Global sebagai Fundamental Change Of Circumstances: Literasi Kontrak Internasional, ditulis oleh Ma’rifah, Julius Jillbert, Endang Samsul Arifin, Muhsyanur, dan Rusnadi A. Kasan. Bab 7, membahas tentang Politik Hukum, Keadilan dan Konflik atas Pengelolaan Lingkungan di Industri Pertambangan Mineral dan Batubara, ditulis oleh Suryaningi. Bab 8, membahas tentang Rebuilding Tata Kelola Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Critical Natural Capital) Berbasis Nilai Keadilan Lingkungan, ditulis oleh Indah Cahyani, Nikmah Fitriah, dan Muhammad Nasir. Bab 9, membahas tentang Paradigma Hukum sebagai Evaluasi dan Kritik Hukum Nasional di Era Pandemi Covid-19, ditulis oleh Abdul Hamid, Istiana Heriani, dan Maksum. Bab 10, membahas tentang Pergeseran Otonomi Nilai Religi dan Budaya (Truth Claim Autonomy) dan Konteks Modus Vivendi sebagai Hukum Ad Baculum, ditulis oleh Ita Rahmania Kusumawati, Indra Kristian, M. Rendi Aridhayandi, Bram B. Baan, Dewi Maharani. Bab 11, membahas tentang Peran Polri dalam Penanganan Covid-19 dengan Mengaplikasikan Konsep Presisi dan Berkeadilan Bermartabat di Masa Pandemi, ditulis oleh Anwar Sodik dan Yusrina Handayani.

**Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**
May 08 2021 Keberadaan suatu korporasi tidak terlepas dari kehidupan masyarakat yang justru dapat berdampak negatif, yakni melakukan berbagai tindak pidana. Untuk menghadapi maraknya tindak pidana korporasi dewasa ini, telah dilakukan upaya penanggulangan, yakni dengan mengoptimalkan kebijakan kriminal (criminal policy) sebagai upaya rasional dari masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi, salah satunya dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (penal policy). Kebijakan formulasi mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan khusus (lex specialis) di Indonesia dapat dikatakan inkonsisten, tidak harmonis, tumpang tindih, tidak sinkron atau tidak terintegrasi antara ketentuan yang satu dengan ketentuan yang lain (diatur secara parsial) sehingga mempengaruhi aplikasi dan eksekusinya dalam praktik berhukum di Indonesia. Buku ini menguraikan kebijakan kriminal sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan; kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal policy); tahap-tahap fungsionalisasi kebijakan hukum pidana, pengertian korporasi dalam ilmu hukum pidana dan permasalahan kebijakan formulasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang tersebar lebih dari 120 peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP di Indonesia baik yang sudah maupun yang belum terkodifikasi. Hal ini dibagi ke dalam 3 (tiga) periode, yakni periode tahun 1950 - 1980an (20 undang-udang), a periode tahun 1990 - 2000 (35 undang-undang), dan periode tahun 2000 - 2017 (lebih dari 65 undang-undang) serta pada Rancangan KUHP versi tahun 2015, Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Mari bersatu memberantas bahaya penyalahgunaan narkoba (naza).
Dec 15 2021 Preventing drug abuse and methods of treatment for narcotic addicts in Indonesia.

**Penegakan Hukum PenyalahgunaanNarkoba di Indonesia**
Dec 23 2019 Penyalahgunaan narkotika sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia telah mengategorikan tindak pidana narkotika sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crimes). Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan narkotika harus serius dengan cara-cara yang luar biasa pula. Apabila pemberantasan narkotika masih menggunakan cara-cara lama, maka penegak hukum dapat dipastikan akan kalah dengan sindikat atau jaringan narkotika. Saya sangat menyarankan buku ini dimiliki oleh pihak penegak hukum, khususnya Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai ujung tombak pemberantasan narkotika dan psikotropika di Indonesia. Buku ini menjelaskan secara sistematis dan kritis tentang penegakan hukum terhadap delik narkoba di Indonesia. Saya menyambut baik terbitnya buku ini dan semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.” —Dr. Ir. Herman Fithra, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng. Rektor Universitas Malikussaleh, Aceh
”Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dipandang sebagai kejahatan serius yang dapat merusak tatanan kehidupan secara universal. Bukan hanya berdampak negatif kepada kehidupan secara pribadi pengguna tetapi dapat merusak kehidupan sosial dan bahkan menyebabkan kematian. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku peredaran dan penyalahgunaan narkoba harus ditingkatkan serta melibatkan semua elemen bangsa. Buku ini menyajikan menjelaskan secara sistematis peranan penegak hukum dan masyarakat dalam memberantas tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkoba sehingga buku ini bukan hanya dapat menjadi rujukan insan akademisi, tetapi juga dapat menjadi rujukan bagi penegak hukum dan praktisi hukum lainnya.” —Prof. Jamaluddin, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh
”Jaringan sindikat narkoba internasional telah menjadikan Indonesia

sebagai tujuan peredaran narkoba dan tempat produksi narkoba dalam skala yang lumayan besar. Oleh karena itu, aparatur penegak hukum, khususnya BNN dituntut lebih dalam memberantas tindak pidana peredaran narkotika di Indonesia. Buku ini bukan hanya memuat aspek teoretis saja tetapi buku ini menguraikan secara mendalam aspek praktis sehingga pembaca mendapatkan informasi yang lengkap dan menyeluruh berkenaan dengan penegakan hukum terhadap peredaran serta penyalahgunaan narkotika yang merupakan salah satu dari kejahatan luar biasa (extraordinary crime) di Indonesia. —Prof. Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Buku persembahan penerbit PrenadaMedia #Kencana

**Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana** Apr 26 2020 Studi masalah korban kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan tentang viktimologi, yakni suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Kategori korban kejahatan meliputi dua kategori yakni korban kejahatan dan korban penyalahgunaan kekuasaan. Substansi peristiwa pidana secara materiil lebih banyak ditentukan oleh peranan saksi dan korban khususnya dalam pembuktian suatu peristiwa pidana. Dalam kenyataan di lapangan para saksi dan korban sering mendapat tekanan ancaman oleh orang-orang yang berkepentingan dengan peristiwa pidana ini. Perlindungan korban di Indonesia berdasarkan pada konsep reatributive justice yang tidak hanya menghadirkan pelaku dalam sistem peradilan pidana melainkan juga di dalamnya melibatkan peran korban dan masyarakat. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006 sebagai lembaga negara bertujuan untuk melindungi Warga Negara Indonesia dari tekanan fisik dan psikis dari para pelaku kejahatan maupun para penyalahguna kekuasaan negara. Buku ini memaparkan viktimologi dalam sistem hukum pidana meliputi permasalahan viktimologi dewasa ini; perkembangan perlindungan hukum saksi dan korban; peranan negara restorative justice, pemenuhan hak-hak sipil dan politik bagi perlindungan saksi dan korban; disparitas pemenuhan hak saksi dan korban; penegakan hukum serta perlindungan saksi dan korban; perspektif lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) terhadap perkembangan viktimologi; pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban; struktur lembaga saksi dan korban; dan perspektif perlindungan saksi dan korban dalam hukum pidana. Buku ini sangat penting dibaca oleh akademisi, peneliti, hakim, jaksa, advokat, mahasiswa, aparat pemerintahan, serta masyarakat umum.

**Transnational Organized Crime and International Security** Apr 07 2021 Though the provision of illicit goods and services is far from being a new phenomenon, today's global economic environment has allowed transnational organized crime an unprecedented capacity to challenge states. The authors of this book examine the trends underlying the explosion of transnational organized crime and consider possible responses. Emphasizing the difficulties encountered by individual states in their efforts to deal with this security dilemma, they highlight the growing importance of multilateral initiatives.

**Eksekusi Pidana Mati Tindak Pidana Narkotika** Oct 25 2022 Di Indonesia Eksekusi Pidana Mati menimbulkan Pro dan Kontra yang sampai saat ini masih hangat untuk dikaji. Selama periode dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 terdapat 106 narapidana yang telah dijatuhi pidana mati. Dari 106 Terpidana tersebut, terdapat 18 narapidana yang telah di eksekusi, dan masih terdapat 88 narapidana yang masih menunggu eksekusi. Sebagian dari jumlah tersebut telah mengajukan grasi kepada Presiden dan kesemuannya telah ditolak, artinya mereka dalam proses menunggu untuk dilakukannya eksekusi mati. Kebijakan tentang penundaan dalam penerapan pidana mati menimbulkan efek yang berpotensi menyebabkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, seperti: (a) terjadinya ketidakpastian hukum yang mengakibatkan terpidana mati tidak bisa menggunakan hak-haknya untuk diperlakukan secara adil dimata hukum, (b) adanya perlakuan yang diskriminatif yakni dengan membeda-bedakan masa hukuman antara terpidana mati yang satu dengan yang lainnya, (c) selain itu juga adanya indikasi penyiaksan terhadap terpidana mati yakni dengan memberlakukan pidana mati ditambah dengan pidana penjara (dalam kurun waktu yang tidak menentu). Hal ini pada gilirannya akan memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Untuk itu pada awal buku menguraikan Tentang Sistem Peradilan Pidana dan pemidanaan serta Tentang Pidana Mati Terpidana Narkotika yang dapat dijadikan dasar penulisan. Selain itu pendiskripsian karakteristik eksekusi pidana mati terhadap narapidana narkotika dengan mengkaji data terpidana mati serta dalam menjawab Faktor-faktor yang mempengaruhi eksekusi mati terhadap narapidana narkotika dianalisis dengan menggunakan Teori menurut Soerjono Soekanto.

**Empowering Science and Mathematics for Global Competitiveness** Feb 05 2021 This conference proceedings focuses on enabling science and mathematics practitioners and citizens to respond to the pressing challenges of global competitiveness and sustainable development by transforming research and teaching of science and mathematics. The proceedings consist of 82 papers presented at the Science and Mathematics International Conference (SMIC) 2018, organised by the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia. The proceedings are organised in four parts: Science, Science Education, Mathematics, and Mathematics Education. The papers contribute to our understanding of important contemporary issues in science, especially nanotechnology, materials and environmental science; science education, in particular, environmental sustainability, STEM and STEAM education, 21st century skills, technology education, and green chemistry; and mathematics and its application in statistics, computer science, and mathematics education.

**Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas & Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana** Jul 30 2020 Putusan bebas (vrijspraak) Pengadilan yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan sering menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat dan pencari keadilan yang cenderung diartikan negatif, bahkan menjadi bahan kajian baik praktis maupun akademisi bidang ilmu hukum karena dirasakan penanganan perkara tersebut seolah telah “mencederai” rasa keadilan masyarakat. Sikap Penuntut Umum terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri yakni menerima putusan tersebut sehingga menjadi putusan yang telah berkeuatan hukum tetap atau melakukan upaya hukum kasasi. Kasasi terhadap putusan bebas alasan yuridis yang kuat dari aspek pembuktian. Tidak dibenarkan kasasi dilakukan oleh Penuntut Umum hanya dengan pertimbangan “tidak puas” atas putusan pengadilan atau “memanfaatkan” instrumen kasasi untuk tujuan di luar kepentingan keadilan dan kebenaran. Buku ini berisikan uraian yang membahas pertimbangan-pertimbangan yuridis judex facti (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dan judex juris (Mahkamah Agung) dalam memutuskan bebas (vrijspraak) perkara pidana beserta uraian teori hukum dalam menjatuhkan putusan bebas, kemudian memberikan penjelasan mengenai alasan-alasan normatif dalam mengajukan upaya hukum kasasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 Tanggal 28 Maret 2013. “Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta’ala menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan” Semoga buku ini bermanfaat bagi penulis, praktis hukum (penyidik POLRI/PPNS, jaksa, advokat, dan hakim), kalangan akademisi (dosen dan mahasiswa) serta pemerhati bidang hukum.

**Perlindungan hukum terhadap whistleblower dan justice collaborator dalam upaya penanggulangan organized crime** Mar 26 2020 Bentuk perlindungan hukum terhadap whistleblower dan Justice collaborator dalam hukum positif Indonesia adalah perlindungan bersifat fisik dan psikis, penanganan khusus, perlindungan hukum dan penghargaan. Substansi praktek perlindungan hukum terhadap whistleblower dan Justice collaborator khususnya dalam upaya penanggulangan organized crime di Indonesia yang tercermin dilakukan lpsk, pengadilan negeri dan Mahkamah Agung RI dibahas secara ringkas namun mendalam dalam buku ini, Dapat dibaca di dalamnya. Substansi yang dibahas dalam buku ini mencakup antara lain: urgensi perlindungan hukum terhadap whistleblower dan Justice collaborator dalam upaya penanggulangan organized crime; eksistensi perlindungan hukum terhadap Whistle blower dan Justice collaborator dalam hukum positif Indonesia, nota kesepahaman dan peraturan bersama; dan praktik perlindungan hukum terhadap Whistle blower dan Justice collaborator dalam upaya penanggulangan organized crime di Indonesia dan beberapa negara serta mengagas konsep ideal perlindungannya pada masa mendatang.

*ICLSSEE 2022* Apr 19 2022 This book contains the proceedings of the International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education (ICLSSEE 2022) on 16 April 2022 in Indonesia. This conference was held in collaboration between Nusantara Training and Research (NTR) with Borobudur University Jakarta, 17 Agustus 1945 University (UNTAG), and the Research and Development Agency of the Ministry of Home Affairs. The papers from the conference were collected in a proceedings book entitled: Proceedings of The International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education (ICLSSEE 2022). The presentation of such a conference covering multi-disciplines will contribute a lot of inspiring inputs and new knowledge on current trending in Law, Social Science, Economics, and Education. Thus, this will contribute to the next young generation's researchers to produce innovative research findings. Hopefully, the scientific attitude and skills through research will promote the development of knowledge generated through research from various scholars in various regions. Finally, we would like to express our greatest gratitude to all the steering committee colleagues for their cooperation in administering and arranging the conference. Hopefully, this seminar and education will be continued in the coming years with many more insightful articles from inspiring research. We would also like to thank the invited speakers for their invaluable contribution and for sharing their vision in their talks. We hope to meet you again at the next conference of ICLSSEE.

**MALAPY 2022** Jul 22 2022 Proceedings of the International Conference on Law, Social Science, Economics and Education 2022 Malapy 2022, 28 May 2022, Tegal, Indonesia. Malapy is an International Conference hosted by Universitas Pancasakti Tegal. This Conference is arranged to become an annual conference making room for scholars and practitioners in the area of economic, legal, educational, environmental aspects as well as a combination of all these aspects.

**Bunga Rampai Isu-Isu Krusial tentang Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)** Mar 06 2021 Bunga Rampai ini berisikan tulisan-tulisan yang telah dibuat oleh Mahasiswa dan Dosen Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha. Dengan di terbitkannya Bunga Rampai ini, diharapkan dapat memberikan informasi maupun referensi di bidang ilmu hukum khususnya mengenai Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA).

*TINDAK PIDANA KHUSUS* Jan 16 2022

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA** Aug 23 2022

*Kontroversi hukuman mati* Nov 14 2021 Controversy on capital punishment in Indonesia.

**Kapita Seleкта Pidana Khusus** Feb 23 2020 Buku ajar ini berisi beberapa hal berkenaan dengan pengertian dan ruang lingkup kapita selekta dan tindak pidana khusus, dilanjutkan dengan dasar hukum dan asas-asas berlakunya tindak pidana khusus, dilanjutkan dengan beberapa tulisan mengenai tindak pidana khusus, meliputi: tindak pidana korupsi dan pembuktian terbalik, tindak pidana pencucian uang (money laundering) dan pembuktian, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang (human trafficking), tindak pidana narkotika dan psikotropika

**Kapita Seleкта Hukum Pidana Indonesia** Dec 03 2020 Buku Kapita Seleкта Hukum Pidana Indonesia yang ada di tangan pembaca sekarang ini ditulis guna untuk menambah referensi dan pengetahuan semua lapisan masyarakat terutama bagi mahasiswa yang mempelajari Kapita Seleкта Hukum Pidana. Oleh karena itu, buku ini ditulis terdiri dari XIV bab yang terdiri dari: BAB I Kapita Seleкта Hukum Pidana; Bab II Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking); Bab III Kriminalisasi dan Deskriminalisasi dalam Hukum Pidana; Bab IV Pertanggungjawaban Pidana; Bab V Tujuan Hukum Pidana dan Dasar Hukum Pidanaan; Bab VI Restorative Justice: Dalam R-KUHP dan Sistem Peradilan Pidana; Bab VII Distributive Justice dalam Hukum Pidana; Bab VIII Tindak Pidana Hak Asasi Manusia (HAM); Bab IX Tindak Pidana Korupsi; Bab X Tindak Pidana Narkotika; Bab XI Tindak Pidana Cyber (Cyber Crime); Bab XII Tindak Pidana Pencucian Uang; Bab XIII Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); dan Bab XIV Tindak Pidana Perbankan. Buku persembahan penerbit PrenadaMedia #PrenadaMedia

**Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan** Oct 01 2020 Buku ini menampilkan senarai tulisan yang menggambarkan tantangan dan solusi dalam penegakan hukum serta kebijakan penanggulangan kejahatan pidana di Indonesia, dalam rangka menegakkan supremasi hukum. Di antara topik utamanya: reformasi hukum; supremasi hukum; kekuasaan kehakiman yang merdeka dan sistem peradilan pidana terpadu; mafia peradilan; kepolisian dan kebijakan kriminal; perlindungan HAM dan korban Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

**Masalah narkotika, psikotropika, dan obat2 berbahaya** Nov 21 2019 Drug abuse and illegal distribution of narcotics and psychotropic drugs in Indonesia.

**Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi** Nov 02 2020 Pembangunan hukum pidana nasional yang bertumpu pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat telah lama menjadi impian dan harapan masyarakat. Harapan itu yakni terbentuknya KUHP nasional sebagai pengganti KUHP yang berlaku saat ini. Namun demikian, harapan itu belum kesampaian. Untuk memenuhi kebutuhan hukum dibentuklah berbagai undang-undang (UU) yang memuat norma, sanksi pidana, dan hukum acara pidana yang bersifat khusus. Terbentuknya berbagai UU tersebut sedikit banyak akan berpengaruh pada upaya sinkronisasi dan efektivitas penegakannya. Bahkan dapat menjadi pemicu terjadinya tumpang-tindih kewenangan yang dapat berujung pada konflik antar-sesama penegak hukum. Buku ini terdiri atas empat bab: Bab 1 tentang pendahuluan, berisi sejarah perkembangan Hukum Pidana Khusus dan politik hukum pidana. Bab 2 tentang pengertian dan karakteristik Hukum Pidana Khusus, berisi pengertian hukum pidana, sifat dan pembagian hukum pidana, pengertian Hukum Pidana Khusus, dan karakteristik Hukum Pidana Khusus. Bab 3 tentang subjek hukum dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Bab 4 tentang ruang lingkup Hukum Pidana Khusus, yang terdiri atas uraian terhadap 31 (tiga puluh satu) perumusan tindak pidana (delik) dalam UU yang tersebar di luar KUHP. Perumusan tindak pidana tersebut, yakni: (1) Tindak pidana dalam UU Korupsi; (2) Tindak pidana dalam UU Pencucian Uang; (3) Tindak pidana dalam UU Terorisme; (4) Tindak pidana dalam UU Pengadilan Hak Asasi Manusia; (5) Tindak pidana dalam UU Narkotika; (6) Tindak pidana dalam UU Psikotropika; (7) Tindak pidana dalam UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; (8) Tindak pidana dalam UU Lingkungan Hidup; (9) Tindak pidana dalam UU Perikanan; (10) Tindak pidana dalam UU Kehutanan; (11) Tindak pidana dalam UU Penataan Ruang; (12) Tindak pidana dalam UU Keimigrasian; (13) Tindak pidana dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; (14) Tindak pidana dalam UU Kesehatan; (15) Tindak pidana dalam UU Praktik Kedokteran; (16) Tindak pidana dalam UU Sistem Pendidikan Nasional; (17) Tindak pidana dalam UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; (18) Tindak pidana dalam UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; (19) Tindak pidana dalam UU Perlindungan Anak; (20) Tindak pidana dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik; (21) Tindak pidana dalam UU Pornografi; (22) Tindak pidana dalam UU Kepabeanaan; (23) Tindak pidana dalam UU Cukai; (24) Tindak pidana dalam UU Perlindungan Konsumen; (25) Tindak pidana dalam UU Pangan; (26) Tindak pidana dalam UU Paten; (27) Tindak pidana dalam UU Merek; (28) Tindak pidana dalam UU Hak Cipta; (29) Tindak pidana dalam UU Pemilu; (30) Tindak pidana dalam UU Kewarganegaraan; dan (31) Tindak pidana dalam UU Penerbangan. Sebagai buku yang mengkaji tindak pidana di luar kodifikasi (KUHP), buku ini perlu dibaca oleh berbagai kalangan terutama mahasiswa Fakultas Hukum, akademisi, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat, pegawai rutan/lapas) dan semua kalangan yang tertarik untuk mengenal dan mendalami tindak pidana di luar KUHP. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup ?Kencana

**MIC 2021** Jun 21 2022 This book contains the proceedings of the 1st Multidiscipline International Conference (MIC) 2021 will be an annual event hosted by Nusantara Training and Research (NTR). This year (2021), this event was held in collaboration with Nusantara Training and Research (NTR) with Universitas Borobudur Jakarta will be held on virtual conference in 30 October 2021 at Salatiga, Indonesia. We carry the theme "Improving People's Quality in Pandemic Era," trying to continue to synchronize with all aspects in the pandemic era and prepare to face the new normal, as well as future outlook of the field of Call for papers fields to be included in MIC. The scope of this event is multidisciplinary. Starting from social science, economics, education, law, engineering, religion and other sciences. This conference was attended by participants and delegates from various universities from Indonesia, Malaysia, the Philippines, Australia, and Japan. More than 100 participants from academics, practitioners and bureaucrats took part in this event to exchange knowledge according to their research results and competencies.

*Hukum Pidana Khusus Dalam Teori Dan Penegakannya* Jan 04 2021 Secara filsafat hukum hermeneutika penulis menganalogikan “hukum itu bagaikan matahari yang menyinari di terangnya siang hari, dan bagaikan bulan yang menyinari di gelapnya malam hari, jadi baik yang mau hidup dalam terangnya siang maupun yang mau hidup di gelapnya malam tetap sama-sama diterangi sinar hukum”. Karena itu, masing-masing cabang dan ranting hukum sudah memiliki yurisdiksi khusus atau kewenangan mengadilinya masing-masing berikut asas yang menaunginya, yaitu matahari khusus menyinari siang hari dan bulan khusus menyinari malam hari, karena itu kalau ada masalah di siang hari maka tidak boleh bulan yang menyinarinya, dan kalau ada masalah di malam hari maka tidak boleh matahari menyinarinya. Demikianlah cabang dan ranting hukum itu berjalan baik Hukum Pidana Khusus, Hukum Pidana Umum, Perdata, Administrasi Negara, TUN, dan lain sebagainya berjalan dalam tertib hukum sesuai yurisdiksinya. Demikianlah juga secara filosofis mengapa hukum pidana khusus perlu dipelajari lebih mendalam (radic) oleh para penstudi maupun praktisii yaitu agar memahami tertib hukum dalam setiap yurisdiksi hukum pidana khusus dan penegakannya, termasuk memahami asas hukum di balik setiap masing-masing hukum pidana khusus yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga memahami misalnya mengapa penegakan hukum tindak pidana korupsi penegakannya extraordinary repressive (asas premium remedium), sedangkan dalam hukum pidana pajak extraordinary graceful (asas ultimum remedium), sementara di dalam hukum pidana perbankan berasaskan “demokrasi keuangan” karena kegiatan usahanya “dari nasabah oleh nasabah untuk nasabah” sehingga deliknya disebut menjadi delik khusus perbankan. Hukum Pidana Khusus Dalam Teori Dan Penegakannya ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.

*Jagalah Dirimu dan Keluargamu dari "Api" Narkoba* May 28 2020 Kompilasi Materi Tentang Narkoba Dalam Kegiatan Ganas Annar MUI Pusat Sudah lama ada rencana untuk menulis buku yang berasal dari berbagai materi para narasumber yang memberikan pencerahan kepada peserta kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Anti Narkoba MUI (biasa disebut Ganas Annar) sejak 2016 sampai sekarang. Hal ini dikarenakan materi-materi tersebut sangat penting dan bagus untuk diketahui dan dipahami berbagai kalangan, termasuk orang tua, generasi muda, pendidik, dan ulama. Dengan memahami berbagai teks pengetahuan tentang narkoba diharapkan ada kemampuan melakukan deteksi dini dan kewaspadaan terhadap situasi dan kondisi di sekeliling kita terkait dengan narkoba. Langkah ini akan sangat membantu menguatkan ketahanan diri dan keluarga dari bahaya dan ancaman narkoba, memperkokoh upaya pencegahan beredarnya narkoba, dan segera dilakukan penanganan yang tepat apabila ada penyalahguna narkoba di sekitar kita. Dalam perspektif waspada terhadap bahaya narkoba maka telah menjadi kewajiban setiap umat Islam untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari narkoba.

**Prinsip Dan Praktik Bantuan Hukum Di Indonesia Edisi Pertama** Jan 24 2020 Right to counsel (hak untuk didampingi penasihat hukum) secara khusus diatur di dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Di dalam ketentuan ICCPR, seseorang

memiliki hak dan jaminan untuk membela diri secara langsung atau melalui penasihat hukum yang dipilihnya sendiri, serta diberitahukan mengenai hak tersebut jika dirinya tidak memiliki penasihat hukum, dan mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, serta tanpa membayar jika dirinya tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya. Di dalam ketentuan KUHAP disebutkan bahwa tersangka atau terdakwa yang diancam pidana berhak mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma dari seorang atau lebih penasihat hukum, dan kepadanya diberikan hak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya. \*\*\* Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)

*ICLSSEE 2021 May 20 2022* This book contains the proceedings of the The International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education (ICLSSEE 2021). Where held on 6 Maret 2021 in Salatiga, Central Java. This conference was held in collaboration Nusantara Training and Research (NTR) with Borobudur University Jakarta and the Research and Development Agency of the Ministry of Home Affairs. The papers from these conferences collected in a proceedings book entitled: Proceedings of The International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education (ICLSSEE 2021). The presentation of such conference covering multi disciplines will contribute a lot of inspiring inputs and new knowledge on current trending about: Law, Social Science, Economics, and Education. Thus, this will contribute to the next young generation researches to produce innovative research findings. Hopefully that the scientific attitude and skills through research will promote the development of knowledge generated through research from various scholars in various regions Finally, we would like to express greatest thankful to all colleagues in the steering committee for cooperation in administering and arranging the conference. Hopefully these seminar and conference will be continued in the coming years with many more insight articles from inspiring research. We would also like to thank the invited speakers for their invaluable contribution and for sharing their vision in their talks. We hope to meet you again for the next conference of ICLSSEE.

*Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika* Sep 12 2021 Buku yang berjudul Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkoba, berisi/membahas tindak pidana narkotika, kebijakan hukum, penegakan hukum, independensi kekuasaan kehakiman, hingga keadilan dalam penegakan hukum yang responsif dan progresif.

*Narkoba dari Tapal Batas Negara* Jun 09 2021 Buku ini merupakan hasil karya sebuah penelitian terkait penyalahgunaan Narkoba di batas negara

*Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang* Jun 28 2020 Praktik pencucian uang merupakan tindak kejahatan yang berbahaya. Tindakan kejahatan ini tidak cuma mengkamufase uang hasil kejahatan menjadi tampak bersih atau sebagai uang sah, namun di urutan berikutnya, lewat hasil uang kejahatan itu, dapat pula melahirkan atau mengembangkan jaringan kejahatan selanjutnya. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan pemberantasan praktik pencucian uang amat penting didorong dan dilakukan. Buku ini memaparkan ihwal penegakan hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pembahasannya dimulai dengan pemaparan mengenai pengertian dan proses kejahatan pencucian uang. Kemudian berlanjut pada pembahasan perihal penegakan hukum atas kejahatan TPPU, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan permasalahan penerapannya, serta penyidikan, penuntutan dan putusan dalam perkara TPPU. Lalu diteruskan dengan pembahasan ihwal penerapan UU TPPU pada tindak pidana korupsi dan kejahatan narkotika, serta kejahatan perbankan dan pencucian uang. Di bagian akhir dibahas tentang penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dalam perspektif tindak pidana umum dan khusus. Kehadiran buku ini sangatlah penting mengingat makin maraknya kini tindak kejahatan berupa pencucian uang di Indonesia. Adapun buku ini tidak semata dapat dibaca oleh para mahasiswa atau pengajar dari Fakultas Hukum, namun juga oleh para praktisi hukum, penggiat anti-korupsi, aparaturnegara atau mereka yang menaruh minat pada persoalan tindak pidana pencucian uang.

*petunjuk-teknis-proses-penyidikan-tindak-pidana-narkotika*

Online Library [888spalift.com](https://888spalift.com) on November 26, 2022 Free Download Pdf